Indonesian Journal of Islamic and Social Science
Vol. 2 No.1 Juni, 2024 : 39-48

HAMBATAN GURU DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI KABUPATEN BIREUEN

Edi Mizwar
Institut Agama Islam Almuslim Aceh
edimizwar72@gmail.com

Jarjani Usman
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
jarjani@ar-raniry.ac.id

Sri Suyanta
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
srisuyanta@ar-raniry.ac.id

Abstract

This research aims to identify the obstacles faced by teachers in implementing the independent curriculum in Bireuen Regency. The approach used in this research is a qualitative approach. The research method employed in this study is a survey method, where information is collected from respondents using a questionnaire through Google Forms. The data collected in this study is sourced from Islamic Education teachers (PAI) at the elementary (SD/MI), junior high (SMP/MTs), and senior high (SMA/MA) levels in Bireuen Regency. The data analysis technique used in this research is a descriptive method. Based on the results of the conducted research, it was found that the obstacles faced by teachers in Bireuen Regency in the implementation of the independent curriculum include a lack of experience with independent learning, limited references, access constraints in teaching, time management, inadequate competencies (skills), mindset changes, insufficient support and training, as well as evaluation and assessment issues.

Keywords: *Teacher Obstacles, Implementation of the Independent Curriculum*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan guru dalam implementasi kurikulum merdeka di Kabupaten Bireuen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, dimana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner melalui google forms. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari guru PAI pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA di Kabupaten Bireuen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitiam ini adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan diperoleh informasi bahwa

hambatan yang didadapi oleh guru di Kabupaten Bireuen dalam implementasi kurikulum merdeka antara lain adalah tidak memiliki pengalaman dengan merdeka belajar, keterbatasan referensi, akses yang dimiliki dalam pembelajaran, manajemen waktu, kompetensi (skill) yang belum memadai, perubahan mindset, dukungan dan pelatihan yang kurang, serta evaluasi dan penilaian.

***Kata Kunci**: Hambatan Guru, Implementasi Kurikulum Merdeka*

PENDAHULUAN

Salah satu komponen yang tidak bisa dipisahkan dari dunia pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan. Untuk itu, kurikulum perlu dikembangkan dan diimplementasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional dan meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia.[1] Kurikulum pendidikan selalu berubah, karena itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa saat dibuat. Perencanaan pengembangan kurikulum harus berfokus pada kebutuhan, pendapat, pengalaman hasil belajar, dan kepentingan siswa, sehingga pusat pendidikan adalah siswa. Kurikulum pendidikan Indonesia telah berubah beberapa kali. Kurikulum ini telah berubah sepuluh kali sejak saat itu, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, dan 2022. Kemudian, saat ini ada kurikulum merdeka.

Kurikulum merdeka adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuan alami mereka dalam lingkungan yang tenang, santai, menyenangkan, dan bebas tekanan. Belajar bebas bergantung pada kebebasan dan kreativitas. Program sekolah penggerak diluncurkan oleh Kemendikbud sebagai bagian dari peluncuran pendidikan bebas. Kurikulum merdeka merupakan penataan ulang sistem pendidikan Indonesia. Ini menyatakan bahwa ini dibuat untuk mencegah perubahan dan kemajuan negara agar dapat menyesuaikan diri dengan zaman. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik dan memberikan kebebasan bagi guru untuk mengembangkan materi pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna.

Kurikulum merdeka ini adalah kurikulum terbaru yang dugunakan di Indonesia yang merupakan salah satu program yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan kurikulum ini adalah agar guru, siswa, dan orang tua bisa mendapatkan suasana yang baik menyenangkan. Merdeka belajar merupakan bentuk penyesuaian kebijakan untuk mengembalikan esensi dari asesmen yang semakin dilupakan. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.

Implementasi konsep merdeka belajar mendorong peran guru baik dalam mengembangkan kurikulum yang berlaku juga dalam proses pembelajaran.

[1] Puskur. *Gagasan Kurikulum Masa Depan*. Jakarta: Balitbang Puskur Depdikna, 2007, hal 2

Kontribusi guru dalam proses pengembangan kurikulum penting dilakukan untuk menyesuaikan isi kurikulum dengan kebutuhan siswa di masyarakat. Guru sebagai sumber belajar perlu dapat memahami psikologi siswa, penerapan metode dan strategi pembelajaran yang akan dipakai. Keterlibatan guru secara kolaboratif dan efektif dalam pengembangan kurikulum sekolah untuk dapat mengatur dan menyusun materi, buku teks, dan konten pembelajaran. Selain sebagai salah satu sumber belajar, peran guru dalam konsep kurikulum yaitu sebagai fasilitator pembelajaran dimana hal tersebut dapat didukung oleh kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang refleksinya dalam kebisaaan berfikir dan bertindak yang tercangkup dalam kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial.

Dalam implementasi kurikulum mereka, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai alat pengajaran sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat belajar siswanya. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.[2] Konsep merdeka belajar adalah mengembalikan sistem pendidikan nasional kepada esensi undang-undang untuk memberikan kemerdekaan sekolah menginterpretasi kompetensi dasar kurikulum menjadi penilaian mereka.[3] Namun dalam penerapannya pasti ada beberapa hambatan yang dialami oleh guru-guru dan anak-anak, maka dari itu tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui hambatan guru dalam implementasi kurikulum merdeka di Kabupaten Bireuen.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu obyek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada ujian hipotesis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, dimana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner melalui google forms. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengembalian data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang digunakan adalah guru PAI pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA di Kabupaten Bireuen. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak secara diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data Sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, dan relevensi lain yang relevan dengan permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitiam ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan

[2] Ariga, S. *Implementasi Kurikulum Merdeka Pasca Pandemi Covid-19*. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 662-670, 2022, hal 4

[3] Nasution, S. W. *Asesment Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar*. Prosiding Pendidikan Dasar, 1(1), 135-142, 2022, Hal. 5

menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang.[4]

KONSEP DASAR

A. Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum alternatif mengatasi kemunduran belajar selama masa pandemi yang memberikan kebebasan "Merdeka Belajar" pada pelaksana pembelajaran yaitu guru dan kepala sekolah dalam menyusun, melaksanakan proses pembelajaran dan mengembangkan kurikulum di sekolah memperhatikan pada kebutuhan dan potensi siswa. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.[5]

Nadiem Makarim, menjelaskan, bahwa dalam kurikulum merdeka merupakan bentuk reformasi baru dan merupakan gebrakan baru yang berfokus pada tranformasi budaya. Ia juga menuturkan bahwa didalam kurikulum merdeka ini pendekatan tidak melalui administratif saja, namun juga harus berorientasi pada pendekatan kepada anak tersebut. Sehingga kurikulum ini diharapkan mampu membuat lulusan sesuai dengan pelajar Pancasila.[6]

Menurut Ujang Cepi Berlian, dkk. mengutip dari Indrawati, dkk bahwa Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Projek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Projek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata Pelajaran.[7]

Inti dari kurikulum merdeka ini adalah merdeka belajar. Hal ini dikonsep agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya, jika dua anak dalam satu keluarga memiliki minat yang berbeda, maka tolok ukur yang dipakai untuk menilai tidak sama. Kemudian anak juga tidak bisa dipaksakan mempelajari suatu hal yang tidak disukai sehingga akan memberikan otonomi dan

---

[4]Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, Yogyakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2014, hal.179

[5] Suwandi, S. *Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia yang Responsif terhadap Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Kebutuhan Pembelajaran Abad ke-21*. In Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra (pp. 1-12), 2020, hal 7

[6] Ineu Sumarsih, dkk. *Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar*, Vol. 6 No. 5, 2022. 8248-8258, 2022, hal 5

[7] Ujang Cepi Barlian, Siti Solekah, dan Puji Rahayu. *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Journal Of Educational And Language Research : Bajang Journal, vol. 1, No. 12, 2022, hal 4-5

kemerdekaan bagi siswa dan sekolah. Penerapan kurikulum merdeka terbuka untuk seluruh satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus, dan Kesetaraan. Selain itu, satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan implementasi kurikulum merdeka yang mengukur kesiapan guru, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Pilihan yang paling sesuai mengacu pada kesiapan satuan pendidikan sehingga implementasi kurikulum merdeka semakin efektif jika makin sesuai kebutuhan.[8]

Kebijakan merdeka belajar dilaksanakan untuk percepatan pencapaian tujuan nasional pendidikan, yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai keunggulan dan daya saing dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing diwujudkan kepada peserta didik yang berkarakter mulia dan memiliki penalaran tingkat tinggi, khususnya dalam literasi dan numerasi. Dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, peserta didik tidak akan lagi ”dipaksa” untuk mempelajari mata pelajaran yang bukan menjadi minat utamanya. Peserta didik bisa dengan “Merdeka” memilih materi yang ingin dipelajari sesuai minat masingmasing. Ini dia yang dimaksud dengan konsep merdeka belajar.

Kurikulum ini juga mengutamakan strategi pembelajaran berbasis proyek. Artinya, peserta didik akan mengimplementasikan materi yang telah dipelajari melalui proyek atau studi kasus, sehingga pemahaman konsep bisa lebih terlaksana. Proyek ini sifatnya lintas mapel. Melalui proyek ini, siswa diminta untuk melakukan observasi masalah dari konteks lokal dan memberikan solusi nyata terhadap masalah tersebut. Dengan adanya proyek ini, fokus belajar peserta didik tidak lagi hanya semata-mata untuk mempersiapkan diri menghadapi soal-soal ujian. Dengan fokus seperti ini, kegiatan belajar-mengajar tentu akan terasa jauh lebih seru dan menyenangkan, dari pada hanya fokus mengerjakan latihan soal saja.

Kebijakan merdeka belajar tersebut dilaksanakan tidak tanpa alasan, paling tidak ada tiga alasan yang mendukungnya, yaitu:

1. Peraturan pendidikan selama ini umumnya bersifat kaku dan mengikat seperti aturan terkait UN, aturan RPP, aturan penggunaan dana BOS, dan lain sebagainya. Peraturan tersebut terbukti tidak efektif untuk mencapai tujuan nasional Pendidikan.
2. Ketidakefektifan pencapaian tujuan nasional pendidikan terlihat pada hasil belajar peserta didik di komparasi tes internasional. Hal tersebut menunjukkan peserta didik kita masih lemah dalam aspek penelaran tingkat tinggi, khususnya dalam hal literasi dan numerasi.
3. Kebijakan merdeka belajar yang tidak bersifat kaku dan mengikat (fleksibel) diharapkan dapat mengatasi keragaman kondisi, tantangan, dan permasalahan pendidikan yang berbeda antarsekolah. Dilakukan dengan strategi penyelesaian yang berbeda.[9]

Kebijakan pelaksanaan merdeka belajar tentu memberikan manfaat bagi kepala sekolah, guru, orangtua, maupun pemerintah daerah. Paling tidak ada dua manfaat yang akan diperoleh, yaitu:

[8] Abdul Matin, *Implementasi kurikulum Merdeka Belajar di MIN 1 Wonosobo,* Jurnal Kependidikan Islam, No. 1, 2022, hal 62

[9] *Ibid*

1. Kepala sekolah, guru, orangtua, dan pemerintah daerah dapat bergotong royong untuk mencari dan menemukan solusi yang efektif, efisien, dan cepat terhadap kondisi, tantangan dan permasalahan pendidikan di masing-masing sekolah. Khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar peserta didik.
2. Kepala sekolah, guru, orangtua, dan pemerintah daerah merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendidikan di sekolah pada daerah masing-masing.[10]

B. Landasan Pengembangan Kurikulum Merdeka

Kurikulum memiliki peran yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksanaan dan keberhasilan pendidikan. Pengembangan kurikulum yang baik didasarkan pada sejumlah landasan, yakni landasan filosofis, sosiologis, psikologis, konseptual-teoretis, historis, dan yuridis.[11]

Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan mutu capaian pembelajaran, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian proses dan hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan, dan mutu lulusan. Landasan filosofis yang dipilih diharapkan dapat memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia unggul sebagaimana tercantum dalam tujuan pendidikan nasional.[12]

Secara sosiologis, pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Sejalan dengan pandangan ini, kurikulum dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Kurikulum hendaknya diyakini sebagai rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa.[13]

Pengembangan kurikulum juga harus memperhatikan kebutuhan pendidikan yang dapat memberi kesempatan dan pengalaman kepada peserta didik mengembangkan segenap potensi diri yang dimiiknya agar menjadi capaian orestasi yang unggul. Proses pendidikan harus memperhatikan tingkat perkembangan berpikir, minat, motivasi, dan segenap karakteristik yang dimiliki peserta didik. Pendidikan harus mampu memfasilitasi bertumbuh kembangnya kecerdasan spiritual, social, emosional, dan intelektual secara berimbang.

Secara psikologis, proses pendidikan harus memperhatikan tingkat kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Dengan demikian, pendidikan diharapkan akan mampu menghasilkan kecemerlangan akademik dan non-akademik peserta didik. Pengembangan kurikulum harus pula memperhatikan kebutuhan pembelajaran Era Industri 4.0 dan Society 5.0.[14]

---

[10] *Ibid*

[11] Muslikh, Muslikh. "*Landasan filosofis dan analisis terhadap kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka*." *Jurnal Syntax Transformation* 1.3, 2020, hal 40-46.

[12] *Ibid*

[13] *Ibid*

[14] *Ibid*

Secara konseptual-teoretis, pengembangan kurikulum merdeka berdasarkan standar pendidikan nasional sebagai kualitas minimal yang selanjutnya diderivasi menjadi standar kompetensi lulusan (capaian pembelajaran lulusan), standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pendidikan. Kurikulum berbasis capaian dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap (spiritual dan sosial), berpengetahuan, dan berketerampilan. [15]

Landasan historis pengembangan kurikulum mengacu pada berbagai pengalaman sejarah yang berpengaruh terhadap kurikulum yang dikembangkan. Pengkajian tentang landasan historis akan memberikan pemahaman yang lebih jelas dan utuh tentang kurikulum, baik pada dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan landasan historis tersebut pengembang kurikulum akan dapat menghindari kesalahan yang pernah terjadi pada masa lampau dan dapat memberi pemahaman tentang hal-hal futuristik yang harus diakomodasi dalam pengembangan kurikulum.[16]

Secara yuridis, pengembangan kurikulum tentu harus mengacu pada sejumlah regulasi yang ada. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan dan mengakomodasi antara lain Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden RI No 8 Tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional indonesia (KKNI), peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI No 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi yang merupakan perubahan dari Permenristekdikti No 44 Tahun 2015. Pengarus utamaan pendidikan karakter dalam semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan merupakan keniscayaan. Hal mendasar dari pendidikan karakter adalah mendidik dan memberdayakan peserta didik agar mereka memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya.[17]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Merdeka Belajar menjadi suatu kebijakan yang dianggap transformatif di dunia pendidikan, tentu ada berbagai perubahan akan dirasakan oleh guru. Perubahan yang dirasakan guru ini menghadapkannya pada berbagai kendala atau yang perlu diatasi dengan baik. Berdasarkan hasil survey yang penulis lakukan di beberapa sekolah dalam Kabupaten Bireuen, diperoleh informasi tentang hambatan-hambatan yang didadapi oleh guru dalam implementasi kurikulum merdeka. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Tidak memiliki pengalaman dengan merdeka belajar

Pengalaman personal para guru terkait merdeka belajar masih sangat minim. Sebenarnya telah banyak program pemerintah yang sebenarnya bertujuan untuk mempromosikan perubahan paradigma dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Beberapa program di antaranya

[15] *Ibid*
[16] *Ibid*
[17] *Ibid*

seperti Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) maupun Kelompok Kerja Guru (KKG). Alasan guru belum mampu mengadopsi merdeka belajar dipicu oleh cara dan pengalaman guru belajar di bangku kuliah. Kurangnya rujukan penyelesaian soal dengan variasi metode di buku teks pun diduga sebagai penyebabnya. Minimnya pengalaman pembelajaran dengan cara merdeka ini juga disebabkan saat guru masih menjadi siswa, sebagai mahasiswa calon guru, maupun ketika menjalani pelatihan sebagai guru dalam jabatan.

2. Keterbatasan referensi

Buku teks yang ada saat ini dinilai masih berkualitas cukup rendah. Baik buku guru maupun siswa yang diterbitkan pusat perbukuan atau penerbit swasta belum memberikan referensi yang dapat membantu guru dalam memperoleh rujukan terkait bagaimana memfasilitasi pembelajaran berpusat pada siswa dengan efektif. Keterbatasan dalam mendapatkan referensi pelaksanaan merdeka belajar inilah yang kemudian juga menjadi guru dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang sesuai.

3. Akses yang dimiliki dalam pembelajaran

Adanya perbedaan akses digital dan akses internet yang belum merata juga menjadi kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan merdeka belajar. Dalam wacana pelaksanaan merdeka belajar yang disampaikan Mendikbud, ada enam model pembelajaran yang dapat diterapkan. Salah satu model belajar yang dapat dilakukan ialah daring. Kelancaran pelaksanaan belajar secara daring pastinya ditentukan dari akses digital dan internet yang dimiliki guru dan siswa. Tidak sedikit sekolah-sekolah yang belum memiliki fasilitas memadai atau guru dan siswa yang aksesnya terbatas mengalami kesulitan. Perbedaan fasilitas, sarana prasarana dan kemudahan akses teknologi menjadi kendala yang terkadang dihadapi guru.

4. Manajemen waktu

Dalam upaya transformasi proses pembelajaran, guru mungkin membutuhkan waktu lebih untuk belajar lagi supaya dapat adaptif dengan tuntutan perubahan yang diharapkan. Beberapa sekolah menentukan agenda yang cukup padat untuk melibatkan guru agar berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan. Belum tugas-tugas dan tanggung jawab lain yang menyertai. Guru sebisa mungkin bergerak dan menemukan cara kreatif inovatif dalam pembelajaran. Tidak semua guru mampu mengatur waktunya dengan baik, terutama dengan kesibukan atau persoalan yang lain yang sekiranya dihadapi.

5. Kompetensi (skill) yang belum memadai

Minimnya pengalaman dalam implementasi kemerdekaan belajar juga menentukan kualitas atau kompetensi yang dimiliki guru. Beberapa guru bahkan mengalami kesulitan untuk menguasai atau menerapkan keterampilan dasar untuk kebutuhan belajar di era digital seperti Ms. Word, membuat presentasi yang menarik dan menyenangkan, dan lainnya. Padahal, untuk melaksanakan merdeka belajar guru dituntut untuk kreatif dan inovatif dengan melibatkan berbagai media atau model pembelajaran yang mendorong siswa. Kompetensi yang masih minim ini juga menjadi kendala guru dapat menjalankan merdeka belajar dengan cepat. Bukan tanpa alasan adanya perubahan selalu diiringi dengan berbagai permasalahan. Sistem pendidikan yang dianggap usang perlu diperbaiki karena hasil evaluasi yang dilakukan selama ini. Guru sebagai garda terdepan dari berbagai

perubahan tersebut mau tak mau harus siap mengambil berbagai upaya dan berani belajar maupun mencoba. Agar tidak hanya beradaptasi, namun juga mampu menyiapkan siswa sebagai generasi bangsa supaya mampu menjawab tantangan di masa depan.

6. Perubahan mindset

Beberapa guru mungkin terbiasa dengan metode pengajaran yang lebih tradisional, dan peralihan ke pendekatan yang lebih progresif dan berpusat pada siswa dapat memerlukan perubahan mindset yang signifikan. Ini mungkin memerlukan dukungan dan pembinaan khusus.

7. Dukungan dan pelatihan yang kurang

Ketersediaan pelatihan dan dukungan yang memadai untuk membantu guru mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar dapat bervariasi. Jika guru tidak mendapatkan dukungan yang cukup, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam mengadaptasi pendekatan baru ini.

8. Evaluasi dan penilaian

Sistem evaluasi dan penilaian dalam kurikulum merdeka belajar cenderung berfokus pada pemahaman konsep dan penerapan pengetahuan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Membuat dan menggunakan alat evaluasi yang sesuai dengan pendekatan ini bisa menjadi tantangan bagi sebagian guru.

PENUTUP

Hambatan-hambatan yang didadapi oleh guru di Kabupaten Bireuen dalam implementasi kurikulum merdeka antara lain adalah tidak memiliki pengalaman dengan merdeka belajar, keterbatasan referensi, akses yang dimiliki dalam pembelajaran, manajemen waktu, kompetensi (skill) yang belum memadai, perubahan mindset, dukungan dan pelatihan yang kurang, serta evaluasi dan penilaian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Matin, *Implementasi kurikulum Merdeka Belajar di MIN 1 Wonosobo*, Jurnal Kependidikan Islam, No. 1, 2022

Ariga, S. *Implementasi Kurikulum Merdeka Pasca Pandemi Covid-19*. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 662-670, 2022.

Ineu Sumarsih, dkk. *Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar*, Vol. 6 No. 5, 2022. 8248-8258, 2022

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Pustaka Setia, 2011

Muslikh, Muslikh. "*Landasan Filosofis Dan Analisis Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Dan Kampus Merdeka*." *Jurnal Syntax Transformation* 1.3, 2020

Nasution, S. W. *Asesment Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar*. Prosiding Pendidikan Dasar, 1(1), 135-142, 2022

Puskur. *Gagasan Kurikulum Masa Depan*. Jakarta: Balitbang Puskur Depdiknas. 2007

Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, Yogyakarta:CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2014

Suwandi, S. *Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia yang Responsif terhadap Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Kebutuhan Pembelajaran Abad ke-21*. In Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra (pp. 1-12), 2020

Ujang Cepi Barlian, Siti Solekah, dan Puji Rahayu. *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Journal Of Educational And Language Research : Bajang Journal, vol. 1, No. 12, 2022